

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Jaya Kusuma Edy¹⁾, Wahyu Rohayati²⁾

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi,

²⁾Dosen FISIPOL Universitas Jambi,

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Metode pengumpulan data padapenelitian ini dilakukan dengan penelusuran data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Sesuai permasalahan dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Sehingga diperoleh suatu gambaran tentang Kontribusi Retribusi Jasa Umum, baik yang berwujud dalam angka maupun yang tidak berwujud dalam angka yang merupakan penjabaran terhadap data yang dikumpulkan dalam bentuk keterangan-keterangan, penjelasan dan pembahasan secara tertulis. Hasil penelitian rata-rata Penerimaan retribusi jasa umum tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 8,99%, efektivitas penerimaan retribusi jasa umum selama tahun 2011-2015 memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 79,84% artinya cukup efektif, penerimaan retribusi jasa umum selama tahun anggaran 2011-2017 memberikan kontribusi terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 10,01% pertahun yang dapat dikatakan berkriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Sarolangun.

Kata Kunci : kontribusi, retribusi, jasa umum, pendapatan asli daerah

Latar Belakang

Sebagai proses yang berkelanjutan, pembangunan dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah sangat membutuhkan dana yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan masyarakat dan kegiatan lain untuk menunjang keberlangsungan suatu pembangunan nasional. Dana-dana yang dibutuhkan tersebut dapat diperoleh melalui sumber penerimaan pajak negara, keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui pinjaman dari luar negeri.

Daerah memerlukan sumber-sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini didukung oleh diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang menghendaki setiap daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan asli daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah diberikan hak, kewajiban, dan wewenang dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

Dalam konteks otonomi daerah, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mencari sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, yang dinamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan otonomi daerah seperti melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga diharapkan pendapatan asli daerah ini dapat menjadi sumber utama dalam anggaran rumah tangga daerah.

Peningkatan PAD tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen pendapatan asli daerah. Komponen-komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan daerah lainnya merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah yang akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Salah satu dari keempat pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Seperti pendapatan asli daerah lainnya, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahunnya, dan mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Dengan adanya kontribusi yang besar dari pendapatan retribusi daerah, diharapkan pengembalian retribusi daerah melalui mekanisme belanja daerah dapat berjalan secara maksimal dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di lembaga daerah.

Kabupaten Sarolangun berpotensi baik dalam bidang pelayanan jasa-jasa umum yang diusahakan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun maupun oleh pihak swasta. Hal itu terbukti dengan berkembangnya minimarket, pertokoan, mall dan pasar yang dapat menunjukkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Sarolangun juga meningkat.

Jumlah jasa-jasa umum yang terdapat di Kabupaten Sarolangun tersebut berpotensi dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi jasa umum yang menjadi penyumbang terbesar kepada penerimaan retribusi daerah selain retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Salah satu komponen retribusi daerah yang potensial adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Marihhot P. Siahaan, 2005).

Realisasi penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2006-2010 masih belum terlaksana secara optimal karena realisasi penerimaannya masih dibawah target yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, perlu dilakukan penelitian dengan topik "Analisis Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Sarolangun".

Perumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun.
2. Berapa besar kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terhadap PAD di Kabupaten Sarolangun.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002), data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekundernya adalah laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sarolangun.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun dan BPS Kabupaten Sarolangun.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan penelusuran data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan proses perolehan dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang praktek pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara yang digunakan dalam menganalisis data. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002), analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan 3 (dua) metode analisis data yaitu :

Analisis Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Analisis perkembangan menggambarkan perubahan tingkat perkembangan realisasi penerimaan retribusi jasa umum dari tahun ke tahun, untuk mengetahui menurun atau meningkatnya retribusi jasa umum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Widodo dalam Khairul Amin (2008), maka rumusnya adalah :

$$PRJUt = \frac{RJUt - RJUt-1}{RJUt-1} \times 100 \%$$

Ket :

PRJUt = Perkembangan retribusi jasa umum pada tahun tertentu

RJU_t = Retribusi jasa umum pada tahun tertentu
RJU_{t-1} = Retribusi jasa umum pada tahun sebelumnya

Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum dan Sub-sub Penerimaan Retribusinya

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Ihyaul Ulum MD., 2009). Menurut Yunita Anggarini dan B. Hendra Puranta (2010), efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Ihyaul Ulum MD (2009) dan setelah disesuaikan dengan variabel yang diukur dalam penelitian ini, maka rumusnya menjadi :

a. Efektivitas Retribusi Jasa Umum

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Jasa Umum}}{\text{Target Retribusi Jasa Umum}} \times 100 \%$$

b. Efektivitas Sub-sub Retribusi Jasa Umum

$$\text{Efektifivas} = \frac{\text{Realisasi Sub-sub Retribusi Jasa Umum}}{\text{Target Sub-sub Retribusi Jasa Umum}} \times 100 \%$$

Kriteria efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900-327 yang dikutip Yulia Anggara Sari (2010) adalah sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100% = sangat efektif
- b. 90% - 100% = efektif
- c. 80% - 90% = cukup efektif
- d. 60% - 80% = kurang efektif
- e. Kurang dari sama dengan 60% = tidak efektif

Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Terhadap PAD

Kontribusi retribusi jasa umum adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan penerimaan retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Ritonga dalam Khairul Amin (2008) dan setelah disesuaikan dengan variabel yang diukur dalam penelitian ini, maka rumusnya menjadi :

$$\text{KRJU}_t = \frac{\text{RJU}_t}{\text{PAD}_t} \times 100 \%$$

Ket :

KRJUt = Kontribusi retribusi jasa umum pada tahun tertentu

RJUt = Penerimaan retribusi jasa umum pada tahun tertentu

PADt = Penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tertentu

Kriteria kontribusi menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 yang dikutip Yulia Anggara Sari (2010) adalah sebagai berikut:

- a. 0,00% - 10% = sangat kurang
- b. 10,10% - 20% = kurang
- c. 20,10% - 30% = sedang
- d. 30,10% - 40% = cukup baik
- e. 40,10% - 50% = baik
- f. diatas 50% = sangat baik

Indikator Capaian

- a. Diketahuinya perkembangan penerimaan retribusi jasa umum di Kab. Sarolangun.
- b. Diketahuinya besarnya kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terhadap PAD di Kabupaten Sarolangun..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Penerimaan retribusi jasa umu di Kabupaten Sarolangun selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami fluktuasi sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.1. Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)	Perkembangan (%)
2011	2.741.235.535,00	-
2012	2.780.378.741,00	1,43
2013	5.587.008.539,00	100,94
2014	6.658.070.973,00	19,17
2015	1.558.471.985,00	-76,59
Rata-rata		8,99

Sumber :DPPKAD Kabupaten Sarolangun (data diolah), 2017

Penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011 sampai 2015 memiliki rata-rata perkembangan yang Positif yaitu sebesar 8,99% pertahun atau dari sebesar Rp. 2.741.235.535,00.

Pada tahun 2012 Penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun meningkat menjadi sebesar Rp. 2.780.378.741,00 atau sebesar 1,43%. Pada tahun 2013 penerimaan retribusi jasa umum mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan yang paling tinggi yaitu sebesar 100,94% dari sebesar Rp. 2.780.378.741,00 pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 5.587.008.539,00.

Pada tahun 2014 Penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2013 yaitu sebesar 19,17% dari Rp 5.587.008.539,00 menjadi sebesar Rp. 6.658.070.973,00 dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013. Pada tahun 2015 penerimaan retribusi jasa umum mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar Rp. 1.558.471.985,00 atau menurun sebesar -76,59% dibandingkan pada tahun 2014. Perkembangan dari tahun 2011-2017 hanya ada satu perkembangan yang negatif yaitu pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2008, 2009 dan 2010 perkembangannya positif. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun rata-rata positif.

Jadi secara keseluruhan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 rata-rata Penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 8,99%, dengan penerimaan yang tertinggi terjadi pada tahun 2013, sedangkan penerimaan yang paling rendah adalah pada tahun 2015.

Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Penerimaan yang bersumber dari retribusi jasa umum sebagai sumber penerimaan yang berasal dari jasa-jasa umum, penerimaan retribusi jasa umum akan besar jika penerimaan dari sub-sub penerimaannya yang dipungut tersebut juga besar atau sebaliknya penerimaan retribusi jasa umum akan rendah jika penerimaan dari sub-sub penerimaannya yang di pungut tersebut rendah.

Peningkatan penerimaan dapat terjadi tergantung dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menggali sumber penerimaan retribusi jasa umum. Salah satu upaya adalah dengan mengetahui besarnya efektivitas dalam pemungutan pada retribusi jasa umum tersebut. Efektivitas dari retribusi jasa umum tersebut dapat ditentukan dengan membagi besarnya realisasi penerimaan retribusi jasa umum dengan target penerimaan retribusi jasa umum.

Tabel 5.2. Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Retribusi Jasa Umum (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)	Efektivitas (%)
2011	2.990.000.000,00	2.741.235.535,00	91,68
2012	4.510.482.000,00	2.780.378.741,00	61,64
2013	9.186.482.000,00	5.587.008.539,00	60,82
2014	5.573.611.473,00	6.658.070.973,00	119,46
2015	2.375.154.500,00	1.558.471.985,00	65,62
Rata-Rata			79,84

Sumber :DPPKAD Kabupaten Sarolangun(data diolah), 2017

Hasil perhitungan dari efektivitas memberi hasil perhitungan penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2011-2017 memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 79,84% artinya cukup efektif, tetapi kalau dilihat dari tiap-tiap tahunnya efektivitas realisasi penerimaan retribusi jasa umum masih belum efektif karena hanya pada tahun 2014 yang berkriteria sangat efektif yaitu sebesar 119,46% karena over target dari yang direncanakan yaitu memiliki lebih dari target dengan

perbandingan target penerimaan retribusi jasa umum sebesar Rp. 5.573.611.473,00 dengan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 6.658.070.973,00, sedangkan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 realisasi penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Sarolangun masih di bawah target yang direncanakan.

Pada tahun 2011 nilai efektivitas realisasi penerimaan retribusi jasa umum berkriteria efektif yaitu sebesar 91,68% dan sisanya yang sebesar 8,32% tidak terealisasi, berdasarkan perhitungan dari perbandingan target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar Rp. 2.990.000.000,00 dengan realisasi penerimaan retribusi jasa umum yang sebesar Rp. 2.741.235.535,00. Berarti pada tahun 2011 Pemerintahan Kabupaten Sarolangun masih belum optimal dalam pemungutan retribusi jasa umum.

Pada tahun 2012 nilai efektivitas penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Sarolangun berkriteria cukup efektif yaitu sebesar 61,64% dan sisanya tidak berhasil dipungut atau tidak terealisasi, berdasarkan perhitungan dari perbandingan target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.510.482.000,00 dengan realisasi penerimaan retribusi jasa umum yang diterima oleh Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar Rp. 2.780.378.741,00. Berarti pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih belum optimal dalam pemungutan retribusi jasa umum dan realisasinya sangat jauh dibawah target yang direncanakan.

Pada tahun 2013 nilai efektivitas realisasi penerimaan retribusi jasa umum berkriteria cukup efektif yaitu sebesar 60,82% dan sisanya tidak berhasil dipungut atau tidak terealisasi sebesar 39,18%, berdasarkan perhitungan dari perbandingan target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar Rp. 9.186.482.000,00 dengan realisasi penerimaan retribusi jasa umum yang sebesar Rp. 5.587.008.539,00. Berarti pada tahun 2013 Pemerintahan Kabupaten Sarolangun masih belum optimal dalam pemungutan retribusi jasa umum dan realisasinya jauh dibawah target yang direncanakan.

Pada tahun 2014 nilai efektivitas realisasi penerimaan retribusi jasa umum berkriteria efektif yaitu sebesar 119,46%, berdasarkan perhitungan dari perbandingan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar Rp. 5.573.611.473,00 dengan realisasi penerimaan retribusi jasa umum yang sebesar Rp. 6.658.070.973,00. Berarti pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah optimal dalam pemungutan retribusi jasa umum karena realisasi penerimaannya sudah diatas target yang direncanakan.

Pada tahun 2015 nilai efektivitas realisasi penerimaan retribusi jasa umum berkriteria cukup efektif yaitu sebesar 65,62% dan sisanya tidak berhasil dipungut atau tidak terealisasi sebesar 34,38%, berdasarkan perhitungan dari perbandingan target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar Rp. 2.375.154.500,00 dengan realisasi penerimaan retribusi jasa umum yang sebesar Rp. 1.558.471.985,00. Berarti pada tahun 2015 Pemerintahan Kabupaten Sarolangun masih belum optimal dalam pemungutan retribusi jasa umum dan realisasinya jauh dibawah target yang direncanakan

Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Terhadap PAD

Penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011 sampai 2015 terus diupayakan mengalami peningkatan, sehingga nantinya akan memberikan kontribusi yang besar pula terhadap pendapatan asli daerah. Berikut ini tabel kontribusi

penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.3. Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Terhadap PAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%) (%)
2011	2.741.235.535,00	31.605.925.980,21	8,67
2012	2.780.378.741,00	28.009.764.671,40	9,93
2013	5.587.008.539,00	31.307.607.303,24	17,85
2014	6.658.070.973,00	56.546.518.724,70	11,77
2015	1.558.471.985,00	84.090.166.050,44	1,85
Rata-Rata			10,01

Sumber :DPPKAD Kabupaten Sarolangun (data diolah). 2017

Dari tabel 5.3. dapat dijelaskan bahwa rata-rata penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Sarolangun selama tahun anggaran 2011-2015 memberikan kontribusi terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 10,01% pertahun yang dapat dikatakan berkriteria kurang berkontribusi.

Kontribusi terbesar dari penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Sarolangun terhadap pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 17,85%. Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,85%.

Pada tahun 2011 kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah sebesar 8,67% artinya kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 9,93% artinya kurang berkontribusi, sedangkan tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu menjadi sebesar 17,85%. Kemudian pada tahun 2014 kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah sebesar 11,77%, hal ini disebabkan karena sumbangan penerimaan pendapatan asli daerah bukan hanya bersumber dari retribusi jasa umum tetapi masih banyak lagi sumbangan yang berasal dari sumber-sumber lain, seperti penerimaan retribusi daerah lainnya, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kurang berkontribusinya retribusi jasa umum terhadap PAD juga disebabkan oleh adanya beberapa jenis retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun yang dalam pemungutannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan adanya penambahan, pengurangan jenis retribusi yang dipungut pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Kesimpulan

1. Rata-rata Penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar 8,99%, dengan penerimaan yang tertinggi terjadi pada tahun 2013, sedangkan penerimaan yang paling rendah adalah pada tahun 2015.

2. Efektivitas penerimaan retribusi jasa umum di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2011-2015 memiliki rata-rata nilai efektivitas sebesar 79,84% artinya cukup efektif.
3. Penerimaan retribusi jasa umum Kabupaten Sarolangun selama tahun anggaran 2011-2017 memberikan kontribusi terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 10,01% pertahun yang dapat dikatakan berkriteria sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui dinas-dinas yang berwenang harus lebih baik lagi dalam usaha pemungutan retribusi jasa umum supaya perkembangan penerimaan retribusinya kedepan selalu meningkat dan bersifat positif.
2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus bekerja keras, professional dalam pemungutan retribusi jasa umum supaya realisasi penerimaan retribusinya terlaksana secara optimal dan efektif.
3. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus mencari sumber-sumber retribusi jasa umum baru yang berpotensi didaerahnya supaya sumbangan realisasi penerimaan retribusi jasa umum bertambah besar terhadap realisasi penerimaan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti, 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta.
- Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih, 2008. Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 7. No 2.
- Depdagri, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. www.depdagri.go.id .online 1 Juli 2012.
- Depdagri, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. www.depdagri.go.id .online 1 Juli 2012.
- Depdagri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. www.depdagri.go.id . online 1 Juli 2012.
- ESDM, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. www.esdm.go.id. Online 1 juli 2012.
- ESDM, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. www.djlpe.esdm.go.id. Online 1 juli 2012.
- HAW. Widjaja, 2009. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ihyaal Ulum MD., 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Bumi Aksara, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasit Bambang Prakosa, 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press. Yogyakarta.
- Khairul Amin, 2008. Analisis Efektifitas Komponen Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001–2006. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. FE UNJA.

- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI. Yogyakarta.
- _____, 2011. Perpajakan. ANDI. Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pramono Hariadi dkk, 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Ritonga, H, 2003. Statistika. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jakarta.
- Ronny H. Hertanto dan modesta, 2011. Analisa Peranan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten Malang). Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol 12. No 1.
- Suseno Widodo dan Triyoto, 1990. Indikator Ekonomi; Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia. Kanisius. Yogyakarta.
- Sutrisno, 2010. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Efektivitas Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Pati. Jurnal LITBANG. Vol VI. No 12.
- Tulis S. Meliala dan Francisca Widiyanti Oetomo, 2010. Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Semesta Media. Jakarta.
- Yulia Anggara Sari, 2010. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung. Jurnal Wacana Kinerja. Vol 13. No 2.
- Yunita Anggarini dan B. Hendra Puranta, 2010. Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.